

Catatan Diskusi "Pemilu: Jembatan Emas Menuju Masa Depan Indonesia"
(Jakarta, 4 Februari 2004)

Betulkah Pemilu 2004 adalah momentum penting yang harus kita lewati untuk melengkapi proses transisi menuju demokrasi? Bukankah Pemilu 2004 tak lain dari perpanjangan Pemilu 1999 mengingat partai dan para aktornya yang masih sama? Lantas sejauh mana Pemilu 2004 menjanjikan sesuatu yang lebih baik, menjanjikan Indonesia yang lebih cerah *lah* masa depannya dan menjanjikan suatu konsolidasi demokrasi?!

Menurut peneliti LIPI Syamsuddin Haris MA, ada 4 aspek yang saling berkaitan antara satu sama lain, yaitu aspek institusionalisasi, aktor politik, negara, dan masyarakat. "Terjadi kegagalan institusi, ideologi, kepemimpinan yang diukuti dengan kegagalan taktik dan strategi. Hampir semua partai politik meletakkan aturan main partai menjadi pajangan belaka. Belum ada tradisi berorganisasi yang rasional dan bersandar pada prinsip demokrasi. Kepemimpinan yang ada lebih bersifat personal dan oligarkis, yang kadang identik dengan sang ketua umum," ujarnya. "Hampir semua partai politik mengklaim memiliki ideologi sebagai basis perjuangan, tapi pada umumnya ideologi itu tidak lebih sebagai pajangan belaka, ideologi itu justru menjadi semacam alat untuk memperjuangkan kekuasaan kelompok atau kepentingan kelompok dan menjadi semacam formalitas belaka mengingat bahwa tingkah laku elite partai lebih didasari oleh *special interest* yang sifatnya jangka pendek," sambungnya.

Lebih lanjut, menurut Haris, pada 21 Mei 1998 kekuasaan rezim Soeharto memang telah selesai, namun sebetulnya struktur politik Orde Baru masih bercokol kuat. "Struktur birokrasi dan ekonomi sama sekali tidak berubah. Aparat negara masih bersifat melayani kepentingannya dan juga melayani kepentingan kaum kapital, pemilik modal. Kekuatan *civil society* gagal melakukan konsolidasi dan cenderung terpecah-belah. Tak muncul kepemimpinan alternatif menjelang Pemilu 2004 ini," sambungnya.

Smita Notosusanto MA dari Cetro berharap agar masyarakat tetap optimis dengan transisi demokrasi. "Kita harus memberikan konteks transisi sedikit lebih panjang dari 5 tahun karena tak ada satupun negara di dunia ini yang mengalami transisi seperti yang kita alami," katanya. Maklum di Indonesia sistem otoriter bercokol begitu lama. Untuk mengubah sistem tersebut ke model demokrasi pasti butuh waktu yang lebih lama. "Jadi jangan pernah menyerah. Kita harus beranggapan bahwa Pemilu 2004 itu adalah Pemilu yang pertama," sambungnya. Menurutnya, kalau ingin mempercepat proses demokratisasi, kita harus berhasil menyusun konstitusi baru mengingat proses amandemen UUD 45 yang terjadi lebih merupakan aksi tambal sulam.

Dr. Kusnanto Anggoro dari CSIS berharap agar masyarakat Indonesia berhasil selamat melewati badai dan berhasil melalui transisi. "Saya bukan orang yang pesimis dengan keadaan. Sejelek-jeleknya, kita tidak seburuk seperti yang terjadi di Rwanda. Saya juga yakin bahwa Indonesia tidak akan menjadi Uni Soviet (1990) atau Yugoslavia (1992), tidak juga seperti Afganistan," ujarnya. "Untuk itu Pemilu 2004 jelas merupakan suatu hal yang sangat penting dalam konteks perkembangan demokrasi kita," ujarnya.

Pemilu bagaimanapun bukan merupakan sekadar pesta demokrasi yang menjadi pesta penguasa. Pemilu 2004 seharusnya menjadi ajang pertarungan partai-partai untuk membangun demokrasi. Para pemilih seharusnya menjadikan momen Pemilu 2004 menjadi ajang pengadilan terhadap partai-partai bermasalah dan para politikus busuk yang kini menyebar secara merata di semua partai. Hanya dengan itu kualitas Pemilu bisa dijaga dan diharapkan berdampak pada laju transisi menuju demokrasi.***